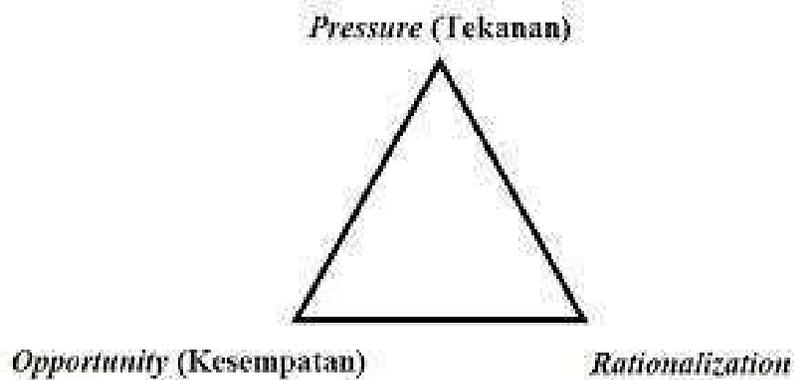


BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Fraud Triangle Teory

Fraud Triangle Theory yang dijelaskan oleh Cressey (1953) ada tiga kondisi yang umumnya timbul pada saat terjadinya kecurangan (fraud) yaitu tekanan (*Pressure*), kesempatan (*Opportunity*), dan rasionalisasi (*Rationalization*). Fraud triangle dapat digunakan dalam pendeteksi faktor apa yang menyebabkan kecurangan laporan keuangan pada penelitian tersebut di jelaskan terdapat tiga faktor pada situasi fraud yaitu:



Gambar 2.1 Bagan Fraud Triangle

1. Tekanan (*Pressure*)

Faktor-faktor seperti gaya hidup, kebutuhan ekonomi, dan lain-lain dapat menyebabkan tekanan sulit untuk memenuhi kebutuhan keuangan adalah penyebab utama stress. Seringkali dianggap sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain; Cressey menyebutkan faktor ini sebagai “a perceived non-shareable financial need”. Selain itu kebutuhan ini tidak dapat diselesaikan secara bersamaan yang berarti harus diselesaikan secara rahasia, yang pada akhirnya mengarah pada kecurangan.

Menurut Cressey dalam Theodorus M (2018) menyimpulkan bahwa tekanan sebagai masalah keuangan seseorang yang tidak dapat diceritakan

kepada orang lain atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *perceived nonshareable financial need*. Sedangkan menurut SAS No.99 terdapat empat jenis kondisi yang umumnya terjadi pada tekanan yang mengakibatkan kecurangan kondisi tersebut adalah melekat pada terjadinya kecurangan pada laporan keuangan adalah *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

1. Kesempatan (*Opportunity*)

Opportunity (Peluang) merupakan peluang yang memungkinkan kecurangan terjadi. Hal ini dapat terjadi akibat dari pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang. Cressey dalam Theodorus M (2018) berpendapat bahwa terdapat dua komponen persepsi tentang peluang yaitu:

- a. *General information*, yaitu pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi
- b. *Technical skill*, merupakan keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan kecurangan.

2. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rationalization (Rasionalisasi) adalah mencari kebenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku. Seseorang yang melakukan kecurangan akan merasionalisasi perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya (Cressey dalam Tuanakotta, 2018).

Rasionalisasi adalah gaya hidup masyarakat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar. Secara tidak langsung, rasionalisasi menawarkan cara untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan saat ini individu sendiri harus menemukan pembenaran dalam tindakan kejahatan ini sendiri, bukan termasuk bagian untuk melakukan suatu tindakan (Nandhita et al., 2016)

2.2 Kecurangan (Fraud)

2.2.1 Pengertian Kecurangan (Fraud)

Kecurangan (*fraud*) adalah pelanggaran hukum yang disengaja oleh satu orang atau lebih dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi seseorang atau kelompok disebut kecurangan. Kecurangan didefinisikan sebagai tindakan illegal atau menyimpang yang dilakukan dengan sengaja dan niat untuk merugikan orang lain guna memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Kecurangan, sebagaimana didefinisikan oleh Alison (2006), adalah jenis kecurangan yang disengaja mengakibatkan kerugian dan menguntungkan pelakunya. Kecurangan biasanya terjadi sebagai akibat dari paksaan untuk keinginan untuk mengambil kesempatan dan rasionalisasi yang sudah ada.

Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016), fraud adalah sebagai tindakan hukum yang diambil dengan niat untuk mencapai tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan informasi palsu tentang pihak lain) oleh individu di dalam organisasi dalam upaya untuk memperoleh manfaat pribadi atau reputasi baik yang tidak berdampak negatif pada organisasi lain.

Menurut Albrecht (2017), Fraud adalah sebagai suatu istilah yang umum, dan tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah". Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan kecurangan, termasuk kejutatan, tipu melihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya dalam mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia. Kecurangan (Fraud). Menurut Cressey (2015), Kecurangan sebagai tindakan yang disengaja oleh individu di antaramanajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau illegal".

2.3 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Husen (2019) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan penipuan yang disengaja yang bertujuan untuk melanggar hak orang lain atau bahkan mencoba mengambil property orang lain hubungan antara penipuan dan konteks audit laporan keuangan adalah bahwa penipuan dapat sebagai penyajian salah laporan keuangan yang disengaja. Berdasarkan perilakunya, The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi kecurangan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. penyimpanan aset (*asset misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. pernyataan palsu (*fraudulent statement*)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. korupsi (*corruption*)

Korupsi (*Corruption*) Karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi. Jenis ini terbanyak terjadi di negara-negara berkembang dengan penegakan hukum yang lemah dan kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga integritasnya dipertanyakan. Karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan bersama, kejahatan jenis ini sering kali tidak dapat ditemukan. Di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (konflik kepentingan), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah atau ilegal (*gratisan ilegal*), dan pemerasan ekonomi.

Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal dan faktor organisasi semuanya dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal adalah kumpulan prosedur yang digunakan untuk melindungi terhadap penyalahgunaan sumber daya perusahaan, menjamin keakuratan informasi bisnis yang diberikan, dan memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan. (Muhammad dan Ridwan, 2017). Teori fraud triangle mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi, salah satunya adalah kesempatan (*opportunity*). Faktor kesempatan dapat memungkinkan pelaku untuk melakukan kegiatan kecurangan akuntansi lebih sering peluangnya, pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kemungkinan penipuan akuntansi.

Kecurangan akuntansi timbul secara berulang-ulang, hal ini karena faktor-faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya kecurangan akuntansi, penyebab terjadinya kecurangan akuntansi menurut J.S.R. Venables & KW Impley dalam Yumaini (2017) dalam (Cendani, 2020), kecurangan timbul karena:

- 1) Penyembunyian (*Concealment*), kesempatan tidak terdeteksi. Pelaku perlu menilai kemungkinan dari deteksi dan hukuman sebagai akibatnya.
- 2) Kesempatan/Peluang (*Opportunity*), yaitu pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi.
- 3) Motivasi (*Motivation*), yaitu pelaku membutuhkan motivasi untuk melakukan aktivitas tersebut, suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan/kerasukan dan motivator yang lain.
- 4) Daya Tarik (*Attraction*), sasaran dari kecurangan yang dipertimbangkan perlu menarik bagi pelaku.
- 5) Keberhasilan (*Succes*), yaitu pelaku perlu menilai peluang berhasil yang dapat diukur baik menghindari penuntutan atau deteksi.
- 6) Tekanan, yaitu dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan yang di picu oleh alasan ekonomi, emosional, atau nilai.

- 7) Adanya peluang, yaitu kondisi yang memberikan peluang kepada seseorang untuk melakukan kecurangan. Misalnya lemahnya internal control atau penyalahgunaan wewenang.

a. Sistem Pengendalian Internal

2.4.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yaitu suatu proses yang memiliki integral terhadap tindakan serta kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan seluruh pegawai guna memberikan keyakinan tujuan yang diharapkan menjadi tercapai yang dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien, dilakukannya pengamanan aset, keandalan terhadap laporan keuangan serta ketaatan instansi pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan rencana dari organisasi serta semua metode dan ketentuan yang telah terkoordinasi yang dianut oleh instansi pemerintah untuk melindungi hak milik (Sari et al., 2019).

Menurut Coram et al. (2008) menjelaskan bahwa pengendalian internal berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Semakin tinggi tingkat pengendalian internal yang diterapkan dalam suatu organisasi, maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin rendah. Committee of Sponsoring Organizations Treadway Commission (COSO) yaitu suatu kelompok sektor swasta yang terdiri dari American Accounting (AAA), AICPA, Institute of Internal Auditors, Institute of Management Accountants, dan Financial Executives Institute. Tahun 1992, COSO mengeluarkan hasil penelitian yang bertujuan mengembangkan definisi pengendalian internal dan memberikan petunjuk untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal.

2.4.2 Unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO (*Committee Of Sponsoring Organizations*), merupakan salah satu teori yang membahas mengenai pengendalian internal yang digunakan dalam

peneliti, berpendapat bahwa pengendalian internal dibagi menjadi 5 unsur-unsur pengendalian internal meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencakup fungsi tata kelola dan manajemen, serta sikap kesadaran dan tindakan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dengan memperhatikan pengendalian internal entitas dan pentingnya hal tersebut dalam entitas. Elemen-elemen lingkungan pengendalian sebagai berikut

- a) Integritas dan nilai-nilai etika, komunikasi atas integritas dan nilai-nilai etika organisasi kepada para karyawan dan upaya penguatannya dalam praktik yang mana mempengaruhi bagaimana cara para karyawan memandang pekerjaannya. Pemberian contoh yang baik dinilai tidak cukup diperlukan juga mengkomunikasikan standar perilaku dan nilai-nilai entitas kepada karyawan.
- b) Komitmen untuk berkompotensi, kompetensi merupakan pengetahuan dan juga keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dijelaskan pada masing-masing pekerjaan. Hal tersebut penting untuk menentukan tingkat kompetensi dalam pekerjaan memiliki pelatihan, pengalaman, dan interligensi yang diperlukan
- c) Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, sangat berpengaruh pada lingkungan internal. Tanggung jawab memandu dan mengawasi serta terlibat di dalamnya, yang memiliki tingkat pengelolaan, keahlian teknis dan keahlian lainnya yang tepat adalah hal penting bagi pengendalian internal yang efektif.
- d) Filosofi dan gaya operasi manajemen, merupakan sikap manajemen tentang pendekatan terhadap pelaporan keuangan, masalah-masalah akuntansi, serta untuk mengambil dan mengelola risiko bisnis.
- e) Struktur organisasi, entitas memberikan kerangka kerja dalam aktivitas bisnis yang direncanakan, dilakukan, dikendalikan, dan dipantau. Adanya kejelasan garis otorisasi dan tanggung jawab,

tingkat dimana sejumlah kebijakan dan prosedur ditetapkan dan dipatuhi, supervise dan pemantauan memadai atas aktivitas operasi, serta ketepatan struktur organisasi atas ukuran dan kompleksitas entitas.

- f) Pemberian otoritas dan tanggung jawab, tanggung jawab dan pendelegasian dijabarkan dalam panduan kebijakan entitas secara formal dimana panduan tersebut menjelaskan sejumlah bertanggung jawab, tugas, dan kendala atas pekerjaan karyawan.
- g) Sejumlah kebijakan dan praktik sumber daya manusia, merupakan hal penting, dengan para karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, kelemahan dalam pengendalian lainnya dapat diimbangi dan laporan keuangan yang reliabel masih mungkin dihasilkan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan kegiatan mengidentifikasi dan melakukan analisa risiko yang dilakukan oleh manajemen yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menilai risiko sebagai bagian dari merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan sejumlah kesalahan dan penyimpangan risiko tersebut dapat berasal dari dalam perusahaan atau luar perusahaan.

3. Aktivitas pengendalian

Sejumlah kebijakan dan prosedur dimana hal tersebut dapat membantu memastikan arahan manajemen yang dilakukan. Aktivitas pengendalian tersebut membantu memastikan tindakan yang perlu diambil guna mengatasi risiko terhadap upaya pencapaian tujuan entitas untuk aktivitas operasi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan berikht kategori aktivitas pengendalian:

- a) Review kinerja, pemeriksaan independen atas kinerja oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam aktivitas. Aktivitas pengendalian ini merupakan sejumlah review dan analisis atas kinerja aktual anggaran, pemeriksaan atas sejumlah prosedur, perbandingan

catatan-catatan akuntansi dan asset-aset fisik secara periodik, serta review kinerja fungsional atau aktivitas.

- b) Pemrosesan informasi atas catatan-catatan transaksi, pengendalian untuk memastikan akurasi masukan dan pemrosesan, dokumen, dan catatan yang memadai. Pengendalian yang berlaku untuk memulai mencatat, memproses, dan melaporkan sejumlah transaksi (seperti Ms.Office, SAP) bukan komputerisasi secara umum. Pemrosesan informasi atas catatan-catatan transaksi, satandar informasi secara umum adalah catatan-catatan transaksi-transaksi dicatat dan dikhtisarkan. Catatan tersebut harus diberikan secara memadai agar dapat membeikan asuransi yang baik, seluruh asset dikendalikan secara tepat dan seluruh transaksi dicatatan dengan benar
- c) Pengendalian fisik, prosedur-prosedur untuk keamanana asset secara fisik sejumlah asset dan catatan yang tidak diproteksi secara memadai dapat dicuru, rusak atau bahkan hilang.
- d) Pemisahan tugas, bertujuan untuk mencegah orang-orang yang memiliki akses ke asset-aset yang mudah dicairkan dari kemampuan menyesuaikan catatan dan pengendalian atas asset tersebut pembagian atau pemisahan tugas diantara orang-orang yang tidak sesuai.

4. Informasi dan Komunikasi

setiap perusahaan atau entitas harus mendapatkan informasi relevan terkait dengan sejumlah peristiwa dan aktivitas, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk keuangan maupun non keuangan. Informasi harus diidentifikasi oleh manajemen sebagai informasi yang relevan dan kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan. Komunikasi terjadi dalam arti luas, mengalir ke bawah, ke samping dan keatas didalam organisasi, seluruh personal wajib menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak bahwa pengendalian harus dilakukan secara serius. Para karyawan harus memahami peranan

seseorang dalam sistem pengendalian internal, bagaimana masing-masing aktivitas berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan pihak lain, serta bagaimana melaporkan informasi-informasi penting kepada manajemen senior.

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses yang berkaitan dengan penilaian yang sedang dilakukan atas kualitas kerja pengendalian internal. Proses ini menyebarkan penilaian atas rancangan pengendalian dan pelaksanaannya secara konsisten atau tepat waktu dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan pemantauan manajemen dapat menentukan apakah pengendalian internal telah dilakukan sebagaimana yang diinginkan dan apakah pengendalian telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

untuk dapat meningkatkan efisiensi usaha, berguna untuk dapat mengecek kecermatan serta keandalan data akuntansi yang ada, serta mampu mendorong menaati kebijakan manajemen yang berlaku. Pengendalian internal berfungsi mengurangi faktor kesempatan yang mendorong dilakukannya tindakan kecurangan (Hogan et al., 2008).

2.4.3 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

Menurut (Scott, 2015), keterbatasan yang terdapat dalam setiap sistem pengendalian internal sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

manajemen dan personel lainnya seringkali melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis atau melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab lainnya

2. Kemacetan

Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas salah mengerti dalam instruksi atau melakukan kesalahan karena kebocoran, kebingungan, atau kelelahan perpindahan personel sementara/tetap atau perubahan sistem atau prosedur, bisa juga mengakibatkan kemacetan.

3. Kolusi

Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan pegawai lainnya, tau dengan pelanggan atau pemasok, bisa tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian lain.

4. Pelanggaran oleh manajemen

Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan/ prosedurprosedur untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi, atau membuat laporan keuangan menjadi tampak baik.

5. Biaya dan Manfaat

Biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian intern seyogyanya tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian internal. Dengan keterbatasan pengendalian internal, kecurangan dan kesalahan harus segera diketahui dan diatasi. Meskipun pegawai sistem dapat merancang sistem yang ideal yang bergantung pada kemampuan dan ketergantungan orang yang menggunakannya, pengendalian internal tidak dapat dikatakan efektif meskipun digunakan dengan kehati-hatian dalam perancangan dan implementasi.

b. Moralitas individu

2.5.1 Definisi moralitas Individu

Moralitas adalah hal yang sesuai yang dilakukan berdasarkankeyakinan umum yang diterima di masyarakat biasanya berkaitan dengan penilaian norma dari tindakan manusia. Jika manusia memiliki level penalaran moral individu yang tinggi maka, individu tersebut cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi dan begitu pula sebaliknya jika level penalaran individu rendah maka setiap individu cenderung melakukan kecurangan(Nurjanah & Setiawan, 2021)

Model Kohlberg merupakan salah satu teori yang membahas mengenai perkembangan moral yang digunakan dalam penelitian etika. (Kohlberg, 1995) berpendapat bahwa perkembangan moral dibagi menjadi 3 tahapan yaitu pra-konvensional, konvensional, serta post-konvensional.

1. Pra-konvensional

Tingkat pra-konvensional dari penalaran moral umumnya terjadi pada anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran yang sama dalam

tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat pra-konvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat pra-konvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral, dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris.

2. *Konvensional*

Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral.

3. *Pasca-Konvensional*

Tingkatan pasca konvensional, juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap lima dan enam dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat 'hakikat diri mendahului orang lain' ini membuat tingkatan pasca-konvensional sering tertukar dengan perilaku pra-konvensional.

Moralitas adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk menanamkan moral yang baik pada individu di seseorang. Menurut Bertens dalam (Ningsih, 2020), menegaskan bahwa etika dan moralitas ada dasarnya indektik. Ketika seseorang tindakan secara etis, perilaku baik dan buruk seseorang. Moral dibedakan menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Moral objektif merupakan jenis moral yang dapat dilihat dalam bertindak sebagai benar disebut Moralitas objektif. Setiap perilaku yang pada dasarnya baik atau buruk pada standar moralitas yang objektif. Di sisi lain, moralitas subjektif adalah teori moral yang berpendapat bahwa kesadaran akan aktivitas yang melanggar hukum dapat memengaruhi perilaku individu.

c. **Budaya Organisasi**

2.6.1 **Definisi Budaya Organisasi**

Budaya organisasi bisa menciptakan sikap etis atau tidak etis, didefinisikan untuk pola sikap yang harus dimiliki setiap anggota organisasi serta bisa menjadikan budaya organisasi yang baik sesuai dengan sistematis sebuah organisasi dan

berguna untuk tujuan organisasi (Adyaksana & Sufitri, 2022). budaya organisasi merupakan pandangan luas tentang persepsi anggota terhadap tindakan pemimpin dalam suatu entitas dan memberikan penghargaan ataupun sanksi atas tindakan tidak bermoral. Budaya organisasi adalah nilai yang dapat dipelajari ataupun dijalankan oleh setiap anggota dan berfungsi sebagai sistem perekat maupun digunakan sebagai acuan untuk mencapai tujuan (Widiyanti, 2019).

Model Robbins merupakan salah satu teori yang membahas mengenai perkembangan Budaya Organisasi yang digunakan dalam penelitian (Robbins, 2013) berpendapat bahwa perkembangan budaya dibagi menjadi 5 sumber yaitu.

1. Model Peran

Model peran merujuk pada cara di mana individu dalam organisasi memahami, melaksanakan, dan menyesuaikan peran mereka berdasarkan harapan dan ekspektasi yang ada. Ini termasuk bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dalam peran mereka, serta bagaimana harapan dari atasan, rekan kerja, dan individu itu sendiri mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Model peran sering kali mencakup peran formal yang ditetapkan oleh struktur organisasi dan peran informal yang berkembang dari interaksi sosial.

2. Komunikasi

Komunikasi dalam konteks budaya organisasi adalah proses penyampaian informasi, ide, dan nilai-nilai antara anggota organisasi. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota memahami harapan, kebijakan, dan tujuan organisasi. Ini melibatkan baik komunikasi verbal maupun non-verbal, serta formal dan informal, dan mempengaruhi bagaimana informasi dibagikan dan diterima dalam lingkungan kerja.

3. Pelatihan Etis

Pelatihan etis merujuk pada proses pendidikan yang dirancang untuk membimbing anggota organisasi dalam memahami dan menerapkan standar etika dalam pekerjaan mereka. Ini mencakup penyampaian nilai-nilai etika, kode etik, dan praktik yang sesuai untuk membantu individu membuat keputusan yang benar dan menghindari perilaku yang tidak etis. Pelatihan

etis bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan mematuhi prinsip-prinsip moral yang diakui.

4. Hukuman

Hukuman dalam konteks budaya organisasi adalah konsekuensi negatif yang diterapkan sebagai respons terhadap perilaku yang tidak sesuai atau pelanggaran terhadap kebijakan organisasi. Hukuman dapat berupa peringatan, penurunan jabatan, atau tindakan disipliner lainnya. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan dan menegakkan standar serta aturan organisasi.

5. Mekanisme

Mekanisme merujuk pada prosedur dan sistem yang diterapkan dalam organisasi untuk mengelola dan mengendalikan perilaku serta proses. Ini termasuk kebijakan, struktur organisasi, dan alat manajerial yang membantu memastikan bahwa anggota organisasi beroperasi sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang diinginkan. Mekanisme dapat berupa sistem pelaporan, kontrol internal, dan prosedur operasional standar.

2.7 Penelitian terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

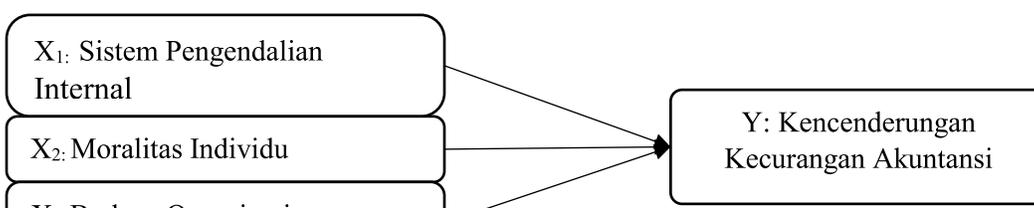
No	Nama penelitian dan tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian

1	(Adyaksana & Sufitri, 2022)	Pengaruh Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi	Moralitas individu memiliki pengaruh negatif pada kecurangan akuntansi, budaya organisasi berdampak negatif pada kecurangan akuntansi.
2	Agung, Anak, K. Finty Udayani dan Maria M. Ratna Sari (2017)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntans	Pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3	Gede, I Dewa, Praditya Chandrayatna dan Maria Mediatrix Ratna Sari (2019)	Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu Dan Budaya Etis Organisasi Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Pengendalian internal, Moralitas individu, dan Budaya etis organisasi berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi
4	Nitimiani & Suardika, (2020)	Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Akuntansi	Moralitas individu, Asimetri Informasi, dan Efektivitas Pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan

		Pada LPD di Kecamatan Tegallalan	kecurangan akuntansi.
5	Mustika, Dian, Hardo Basuki (2022)	Perspective Of Fraud Diamond Theory And Moral Reasoning AS A moderating Variable On Fraud In Village Fuand Management D.I Yogyakarta	Kesesuaian Kompensi berpengaruh positif terhadap fraud pada pengelolaan dana desa, sedangkan budaya organisasi kompetensi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh negative terhadap fraud pada pengelolaan dana desa

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengendalian internal, moralitas individu dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa (studi kasus empiris Pada desa di kabupaten lampung selatan). Dimana pengendalian internal (X1), moralitas induvidu (X2) dan budaya organisasi(X3) merupakan variabel independent. Kecenderungan kecurangan akuntansi(Y) hubungan variabel-variabel tersebut jika di gambarkan melalui kerangka konseptual seperti pada gambar.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Hipotesis penelitian Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah

Kaitannya dengan fraud Triangle Teory yaitu pada tahap opportunity, dimana pada tahap ini akan melakukan tindakan kecurangan apabila terdapat kesempatan untuk melakukannya. Terdapat kesempatan itu terjadi karena sistem pengendalian internal yang lemah, dan peraturan organisasi yang longgar menghadirkan kemungkinan terjadinya kesalahan. sistem pengendalian internal akan mencegah kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang tidak sah dengan peraturan yang berlaku serta mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan oleh pemerintah menurut Kusumastuti (2012). Jika pengendalian internal tidak berjalan dengan baik, prosedur tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka akan membuka kesempatan bagi pegawai yang terlibat dalam kegiatan operasional organisasi untuk melakukan kecurangan. Penelitian Adelin (2013) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, artinya semakin Sistem Pengendalian Internal perusahaan, semakin rendahnya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi perusahaan.

kecenderungan kecurangan akuntansi menurut Setiawan (2019), Putri (2019), dan Wijaya (2017), artinya apabila suatu pengendalian internal dijalankan secara efektif maka kecurangan akan semakin menurun dan apabila pengendalian yang dilakukan buruk maka kecurangan akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H1: Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah.

2.9.2 Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah

Moralitas bisa diartikan sebagai keseluruhan asas serta nilai yang berkaitan dengan baik buruknya sifat manusia. Welton et al. (1994) dalam Wahyu (2019) menyatakan bahwa kemampuan dari setiap individu dalam menyelesaikan dilema etika dapat dipengaruhi oleh level penalaran moral setiap individu tersebut.

Kaitannya dengan Fraud Triangle Teory yaitu pada tahap pressure karena moral dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk keluarga, pekerjaan, dan konteks organisasi. Karena Fraud Triagle Teory berlaku maka tidak dapat dipungkiri apabila seorang pemrintah melakukan tindak kecurangan. Seseorang yang tidak menjunjung tinggi moralitas akan mengambil keputusan atas keinginannya sendiri serta mengabaikan kewajiban dan peraturan yang seharusnya dipenuhi. Maka dalam hal ini perlu upaya untuk mencegah tindakan tersebut, yaitu dengan menanamkan moralitas kepada setiap individu.

Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Mustika & Basuki, 2022) artinya bagi setiap individu yang memiliki level penalaran moralitas individu yang tinggi akan cenderung melakukan perbuatan yang etis dikarenakan memiliki sifat sensitif akan isu-isu etika yang terjadi dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah.

2.9.3 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah

Berpendapat bahwa budaya organisasi merupakan sebuah sistem, keyakinan serta makna yang dijadikan sebagai pedoman oleh anggota yang menentukan sebagaimana besar cara mereka dalam mengerjakan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Budaya organisasi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kaitannya dengan Fraud Triangle Teory yaitu pada tahap rationalize, dimana pada tahap ini seorang berada dibawah tekanan besar untuk membenarkan tindakannya kepada pemerintah agar mereka tampak logis dan tepat. Ketika nilai-nilai dan norma organisais diterapkan dengan benar, kegiatan kecurangan berkurang namun, ketika nialai dan norma tidak diterapkan dengan benar, tinakan kecurangan dibenarkan dan dipandang masuk akal. Karena anggota organisasi mungkin meliat budaya organisasi sebagai sistem bersama. Karena budaya perusahaan yang kuat menumbukan rasa memiliki di antara anggotanya, kecurangan akuntansi dapat dihindari atau bahkan diberatas sepenuhnya, mencagah peluang kecurangan akuntansi

Artinya budaya yang buruk didalam sebuah organisasi akan meningkatkan terjadinya kecurangan dan apabila budaya organisasi baik maka akan mengurangi terjadinya kecurangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian natalia (2018). Maka dapat berdasarkan uraian diatas rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah